

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat kinerja perekonomian baik ditingkat nasional maupun regional (daerah). Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian yang meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan yang semakin besar. Pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga meningkatkan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Pembangunan manusia dapat dilakukan dengan meningkatkan beberapa aspek penting bagi kehidupan manusia, yaitu usia hidup, pendidikan, dan standar hidup layak. Dalam memperkuat suatu perekonomian agar dapat berkelanjutan perlu adanya suatu perhatian khusus terhadap pembangunan ekonomi. Perekonomian suatu negara sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut meliputi, pendapatan perkapita riil yang tinggi dan mengurangi ketimpangan pendapatan sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada serta mengurangi tingkat kemiskinan.

Salah satu tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan menata kehidupan yang layak bagi seluruh rakyat yang pada selanjutnya akan mewujudkan

kesejahteraan penduduk di Indonesia. Salah satu pembangunan nasional adalah menurunkan tingkat kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyakit dalam ekonomi, sehingga harus disembuhkan atau paling tidak dikurangi. Masalah kemiskinan memang merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dimana dilaksanakan secara terpadu (M.Nasir, Dkk 2008).

Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal standar hidup tertentu. Dalam arti *proper*, kemiskinan dipahami sebagai keadaan dimana kekecurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, Chambers (dalam Chriswardani Suryawati, 2005) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu *integrated concept* yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (*proper*), 2) ketidakberdayaan (*powerless*), 3) kerentanan menghadapi suatu darurat (*state of emergency*), 4) ketergantungan (*deppendence*), dan 5) keterasingan (*isolation*) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan merupakan isu permasalahan bagi setiap negara di dunia ini, khususnya bagi negara berkembang seperti di Indonesia. Di Indonesia, kemiskinan masalah yang sangat besar tidak hanya karena tendensinya yang semakin naik, namun juga konsekuensinya yang tidak hanya meliputi ruang lingkup ekonomi semata namun juga masalah sosial dan elektabilitas politik dalam negeri. Oleh karena itu, pengentasan masalah kemiskinan harus menjadi perhatian utama dalam pembangunan ekonomi baik

jangka pendek maupun jangka panjang. Sejak Indonesia merdeka konsep *trilogy* pembangunan dengan teori *trickle down effect* yang diambil oleh Indonesia yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang sementara dan menghasilkan disparitas yang tinggi antar golongan kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dikarenakan sebagian besar pendapatan nasional dihasilkan dari komoditas sumber daya alam maupun sektor industri lain yang banyak menyerap tenaga kerja. Akibatnya ketika sumber daya tersebut tidak lagi mencukupi konsumsi dalam negeri dan akhirnya negara harus mengekspor kebutuhan migasnya. Hal ini mengakibatkan negara mengalami defisit anggaran, seperti yang terjadi saat ini. Kemiskinan pada umumnya disebabkan oleh laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan jumlah kesempatan kerja yang tersedia, angkatan kerja yang tidak produktif, tingkat pendidikan yang rendah dan distribusi pendapatan yang timpang sehingga menyebabkan ketidaksamaan pola pemilikan sumber daya. Hal-hal tersebut menambah angka pengangguran, meningkatnya tingkat kriminalitas, bertambahnya angka anak putus sekolah, kesempatan pendidikan menurun, dan tingkat kesehatan dibawah standar pelayanan minimum sehingga berdampak pada buruknya kondisi perkembangan generasi penerus. Pemerintah dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk bertindak meningkatkan keseluruhan taraf hidup masyarakat yang dalam usahanya untuk keluar dari kemiskinan. Pendapatan dan belanja memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, mengatasi masalah pertumbuhan ekonomi, kemiskinan serta pengangguran. Keberpihakan

pemerintah sebagai pengelolaan keuangan (Pendapatan dan Belanja) adalah strategi yang paling ampuh untuk permasalahan-permasalahan tersebut.

Berikut data jumlah penduduk miskin yang diambil dari Badan Pusat Statistik tahun 2012 sampai dengan 2017 atau 5 tahun terakhir di Indonesia.



Sumber: Ms.Excel

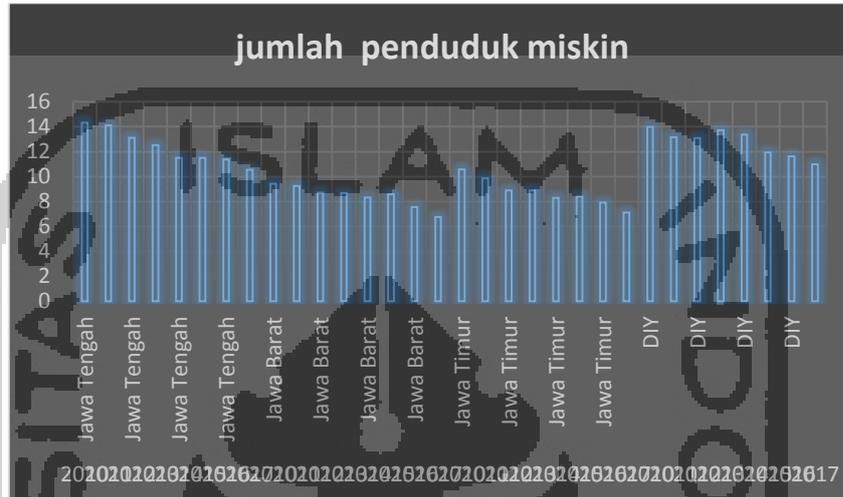
Berdasarkan Grafik 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2012 kemiskinan sebanyak 29,25 persen, pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dengan jumlah 28,17 persen. Namun, pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan dengan jumlah sebesar 28,28 persen. Selanjutnya, pada tahun 2015 jumlah penduduk miskin di indonesia mengalami kenaikan sebesar 28,59 persen. Pada tahun 2016 jumlah penduduk miskin di indonesia kembali mengalami penurunan sebesar 28,01 persen. Pada tahun

terakhir yaitu tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 27,77 persen. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami ketidakstabilan. Meskipun mengalami ketidakstabilan namun jumlah penduduk miskin di Indonesia ini tidak terlalu signifikan dalam perkembangan dari tahun ke tahun. Sebagai gambaran bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia ini lebih cenderung mengalami penurunan.

Dari jumlah 35 provinsi di Indonesia mengenai kemiskinan, salah satunya yang akan diteliti yaitu tingkat jumlah penduduk miskin di provinsi D.I Yogyakarta. Dapat dikatakan bahwa penduduk di provinsi D.I Yogyakarta ini termasuk yang terkecil di antara provinsi di Jawa lainnya seperti Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki beberapa kabupaten yang cukup banyak. Namun, meskipun jumlah penduduk di provinsi D.I Yogyakarta yang kecil ini bukan berarti tingkat jumlah penduduk miskin sedikit. (Grafik 1.2)

Grafik 1.2

Jumlah Penduduk miskin antar 4 provinsi di pulau jawa tahun 2010-2017



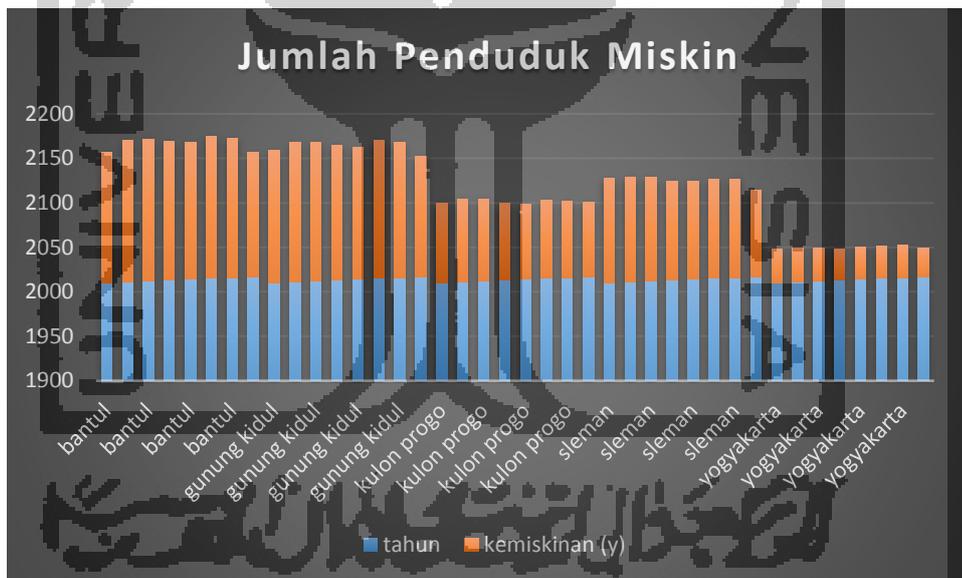
Pada grafik 1.2 menjelaskan mengenai perkembangan jumlah penduduk miskin antar 4 provinsi yang ada di pulau jawa yaitu jawa tengah, jawa barat, jawa timur dan D.I Yogyakarta. Kita lihat perbandingan setiap provinsi nya, dari grafik diatas kita dapat mengetahui bahwa selama kurung waktu 4 tahun terakhir jumlah penduduk miskin paling tinggi di pulau jawa adalah D.I Yogyakarta. Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk paling tinggi di provini di pulau jawa in adalah jawa tengah dengan 35 kabupaten/kota. Sangat jauh jika dibandingkan dengan provinsi D.I Yogyakarta yang hanya 5 kabupaten/kota. Di tahun 2014 jumlah penduduk miskin paling tinggi adalah jawa tengah. Dari 4 provinsi tersebut tingkat jumlah penduduk miskin paling kecil adalah jawa barat. Dari grafik 1.2 khususnya di provinsi D.I Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami naik turunnya tingkat jumlah penduduk miskin. Hal itu menjadi perhatian lebih bagi pemerintahan daerah tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk miskin

paling tinggi dari 4 provinsi tersebut adalah D.I Yogyakarta dengan jumlah penduduk paling kecil diantara 4 provinsi di Jawa tersebut.

Setelah dilihat perbandingan antar provinsi di pulau Jawa, dapat diketahui bahwa provinsi D.I Yogyakarta menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin no 2 setelah provinsi Jawa Tengah. Lalu selanjutnya dapat dilihat grafik tingkat jumlah penduduk miskin per kabupaten/kota di D.I Yogyakarta sebagai berikut:

Grafik 1.3

Jumlah Penduduk Miskin per Kabupaten/Kota di D.I Yogyakarta



Pada grafik 1.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin tiap tahunnya yang paling tinggi berada di daerah kabupaten bantul. Sedangkan jumlah penduduk miskin dibawah kabupaten bantul ialah di daerah kabupaten gunung

kidul. Selanjutnya tingkat jumlah penduduk miskin paling rendah ialah di daerah kota Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk miskin di seluruh kabupaten/kota terjadi tidak stabilan.

Dapat dilihat secara keseluruhan pada grafik diatas bahwa jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta periode 2010 – 2017 atau dalam kurung waktu 7 tahun ini mengalami ketidakstabilan di tiap tahun nya. Hal ini yang membuat peneliti untuk meneliti permasalahan yang dialami pada provinsi D.I Yogyakarta per kabupaten/kota dengan judul “ **ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI D.I YOGYAKARTA PERIODE 2010 – 2017 (PER KABUPATEN/KOTA)** “

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan perumusan masalah yaitu, sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh variabel PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta?
4. Bagaimana pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis jelaskan sebelumnya maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Menganalisis pengaruh variabel PDRB terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta
2. Menganalisis pengaruh variabel Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta
3. Menganalisis pengaruh variabel Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta
4. Menganalisis pengaruh variabel Jumlah Penduduk terhadap jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S1 Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengalaman dan pengetahuan tentang cara penulisan karya ilmiah yang baik khususnya peneliti dan dapat dipakai sebagai bekal jika suatu saat nanti terjun ke masyarakat. Sekaligus memberikan wawasan dan pengetahuan kepada peneliti mengenai Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di D.I.Yogyakarta

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan informasi untuk membuat kebijakan dalam pengentasan kemiskinan

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini berguna bagi penulis untuk melatih kemampuan menulis serta untuk menerapkan ilmu yang didapat selama proses perkuliahan dan dapat memahami data yang diteliti..

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab, yang dimana terbagi dalam berbagai pembahasan diantaranya sebagai berikut :

BAB 1: Pendahuluan

Dalam bab ini, diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Pada bab ini berisikan tentang beberapa kajian penelitian sebelumnya, dimana dalam bab ini ditujukan untuk melihat penelitian sejenis selain dapat digunakan sebagai referensi, juga digunakan sebagai alat verifikasi. Kajian pustaka yang dilakukan adalah dengan menggunakan data sekunder yang

kemudian dilakukan pengkajian setelahnya. Adapun dengan landasan teori digunakan untuk menjelaskan teori-teori relevan yang dipilih dari berbagai sumber tertulis yang mendukung penelitian sedangkan hipotesis berguna dalam membuat dugaan sementara yang penulis dapatkan melalui penelitian terdahulu, teori-teori, dan analisis sementara yang penulis gunakan.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini, menguraikan tentang jenis dan sumber data, definisi operasional, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan cara pengolahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil dan Analisis

Dalam bab ini terdapat dua sub-bab, yaitu deskriptif data penelitian yang berupa pemaparan data yang digunakan. Dalam penelitian dan hasil serta analisis yang merupakan temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian.

BAB V: Kesimpulan dan Implikasi

Bab ini memberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dimana mengacu pada hasil data analisis pada bab IV. Adapun dengan implikasi merupakan hasil dari kesimpulan yang digunakan sebagai jawaban atas rumusan masalah.